

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie, Habib, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indobesia-Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kohar, A, 1983, *Notaris dalam Praktek Umum*, Penerbit alumni, Bandung.
- Lumban Tobing, G.H.S., 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93
- Notodisoerjo,R.Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- _____, 1980, *Sosiologi Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad tahun 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PERMENKUMHAM no. 26 tahun 2014 ttg Formasi Jabatan Notaris

PERMENKUMHAM no. 25 tahun 2014 ttg Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

PERMENKUMHAM No 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Kode Etik Notaris.

C. SEMINAR DAN KARYA ILMIAH

Daulat P. Silitonga, S.H.,M.Hum, Ridwanto, S.H.,M.H. Disajikan dalam Seminar Sosialisasi Kementerian Hukum dan HAM DIY “ *Tata Cara Pendaftaran Dan Pengangkatan Notaris*”, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 03 September 2015.

Meggy Tri Buana Sari Tunggal, *Pengaruh Penempatan Dan Pendayagunaan Notaris Terhadap Pelaksanaan Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Tommy Prabowo, *Formasi Jabatan Notaris dan Kaitannya dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris (Studi Kasus Kabupaten Tangerang)*, Tesis,



Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Salemba, 2011.

Noviyanti Abaidata, *Kebijakan Sentralisasi Dalam Penempatan Notaris Di Papua*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

D. INTERNET

<http://jogja.kemenkumham.go.id/> (Website Resmi Kemenkumham DIY)

www.kemenkumham.go.id (Website Resmi Kemenkumham RI)

<https://ahu.go.id> (Website Resmi Dirjen AHU)

<http://www.jogjaprov.go.id> (Website Resmi Jogja)

<http://www.slemankab.go.id> (Website Resmi Kabupaten Sleman)

www.indonesia.go.id (Portal Nasional Republik Indonesia)